

## **STRATEGI PEMBERDAYAAN BUDAYA USING MELALUI SKEMA *SISTER CITY* UNTUK MENINGKATKAN INDUSTRI PARIWISATA**

Peneliti : Bagus Sigit Sunarko, Sri Yuniati, M. Iqbal<sup>1</sup>  
Mahasiswa Terlibat : Moch Taufiq Q, Indah Pratiwi<sup>2</sup>  
Sumber Dana : DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jember

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jember

### **ABSTRAK**

Kebijakan desentralisasi melalui pemberlakuan otonomi daerah telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memberdayakan budaya dan meningkatkan industri pariwisatanya melalui model kerjasama *sister city*. Namun demikian, pengembangan model *sister city* yang melibatkan masyarakat dengan latar belakang tingkat pendidikan menengah kebawah, bercorak agraris, dan memegang teguh nilai-nilai adat memerlukan strategi yang berbeda dengan masyarakat yang sudah modern. Penelitian ini bertujuan ingin merumuskan konsep pengembangan *sister city* yang sesuai dengan profil demografis masyarakat. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, diskusi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kerjasama *sister city* yang dilakukan suatu pemerintah daerah yang memiliki karakteristik masyarakat agraris dan sangat teguh memegang budaya hormat pada pemimpin, maka inisiatifnya tidak bisa diharapkan murni tumbuh dan berkembang dari pihak masyarakat tetapi dari pemerintah. Jadi model pendekatan *top-down* yang sesuai untuk digunakan dalam membangun kerjasama *sister city*. Namun kalau kedua daerah tersebut memiliki karakteristik wilayah dan potensi yang sama, justru dapat melemahkan kekuatan bangunan kerjasama *sister city* yang telah disepakati bersama. Bentuk kerjasama yang dibangun akan lebih sulit tercapai karena kecenderungan yang terjadi diantara keduanya justru adalah kompetisi dan bukan kerjasama dalam artian yang seharusnya.

**Kata kunci:** budaya Using, *sister city*, industri pariwisata, pendekatan *top-down*, pendekatan *bottom-up*

# **STRATEGI PEMBERDAYAAN BUDAYA USING MELALUI SKEMA *SISTER CITY* UNTUK MENINGKATKAN INDUSTRI PARIWISATA**

Peneliti : Bagus Sigit Sunarko, Sri Yuniati, M. Iqbal<sup>1</sup>  
Mahasiswa Terlibat : Moch Taufiq Q, Indah Pratiwi<sup>2</sup>  
Sumber Dana : DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kontak Email : bgs\_sigit@yahoo.com  
Diseminasi (jika ada) : ada

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jember

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jember

## **EXECUTIVE SUMMARY**

### **1. Pendahuluan**

Dalam beberapa tahun terakhir pengembangan industri pariwisata menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah kabupaten Banyuwangi berupaya mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki berupa pariwisata alam, buatan, religi maupun budaya seperti wisata pantai, gunung, pura, desa adat. Selain itu berbagai even atau festival berskala lokal, nasional dan internasional diadakan sepanjang tahun dengan tujuan untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu pariwisata yang dijadikan unggulan Banyuwangi adalah wisata budaya Using.

Masyarakat Using merupakan penduduk asli kabupaten Banyuwangi. Mereka dikenal memiliki budaya yang unik karena mengandung unsur-unsur magis yang merupakan percampuran antara budaya Jawa dan Bali. Masyarakat Using masih percaya terhadap hal-hal yang bersifat ghaib. Dalam kepercayaan mereka, budaya dan seni merupakan bentuk syukur atas berkah, keselamatan dan kelancaran kehidupan yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Keunikan yang dimiliki masyarakat Using ini menjadi daya tarik tersendiri, sehingga pemerintah kabupaten Banyuwangi menjadikan desa Kemiren sebagai desa wisata adat Using.

Berdasar penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi telah menjadikan budaya Using sebagai ikon khas yang digunakan untuk menjadi pembeda dengan destinasi wisata lain sekaligus memanfaatkannya sebagai sarana untuk pengembangan industri pariwisata. Agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menyusun langkah-langkah strategis untuk membangun daya saing dan memasarkan sektor pariwisatanya yakni melalui jargon “*Banyuwangi Sunrise of Java*”. Program kebijakan ini selanjutnya berusaha direalisasikan oleh segenap pemangku kepentingan industri wisata, dengan cara antara lain: 1) menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan; 2) memperlakukan wisatawan secara baik; 3) menyiapkan dan membangun nuansa dan kawasan wisata yang nyaman; 4) promosi wisata; 5) kerjasama antar pelaku industri pariwisata; dan 6) melestarikan nilai-nilai budaya yang bersifat multikultural (Disbudpar, 2016).

Fakta penting lainnya terkait dengan upaya pemberdayaan budaya Using untuk meningkatkan industri pariwisata di Banyuwangi adalah teridentifikasinya adanya peluang besar bagi pemerintah daerah Banyuwangi untuk segera mengembangkan model kerjasama *sister city* dengan daerah lain. Setidaknya ada dua aspek penting yang mendasari argumentasi bahwa Banyuwangi tengah berada pada momentum yang tepat untuk pengembangan model ini. Pertama, ditengah arus globalisasi dewasa ini dan diberlakukannya kebijakan desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah yang telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa, peluang pemerintah kabupaten/kota, termasuk Banyuwangi, untuk merancang inovasi dan strategi pembangunan di segala bidang terbuka lebar. Kedua, momentum tersebut lebih lanjut juga dikuatkan akselerasinya oleh antusiasme dan keyakinan pemerintah daerah Banyuwangi beserta masyarakatnya bahwa kerjasama *sister city* akan dapat lebih mengenalkan budaya Using ke masyarakat luas sekaligus menunjang peningkatan industri pariwisata Banyuwangi.

Sinergitas antara berbagai elemen pemerintah dan non-pemerintah memang sudah cukup solid dan berada pada satu pemahaman yang sama akan pentingnya kerjasama *sister city* dalam pemberdayaan budaya Using guna meningkatkan industri pariwisata, akan tetapi bagaimana metode untuk membangun kerjasama itu

agaknyanya memerlukan kajian yang mendalam. Selama ini proses pembentukan kerjasama *sister city* selalu diawali atau dirintis oleh masyarakat secara informal yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah masing-masing secara resmi. Proses semacam ini terbukti berhasil dalam rintisan kerjasama *sister city* berbasis kerjasama ekonomi terutama ketika kedua daerah atau kota memiliki masyarakat dengan latar belakang tingkat kehidupan sosial, ekonomi dan jenjang pendidikan yang cukup tinggi. Sementara untuk daerah atau kota yang memiliki profil demografis berbeda dengan sebagaimana tersebut di atas, nampaknya perlu dikaji lebih lanjut apakah dapat dikembangkan melalui proses yang sama atau perlu strategi khusus untuk pengembangannya.

Desa Kemiren di kabupaten Banyuwangi sebagai desa adat yang menjadi fokus utama kajian kerjasama *sister city* adalah wilayah dengan masyarakat yang memiliki latar belakang tingkat pendidikan menengah kebawah, bercorak agraris, dan memegang teguh nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-harinya. Jika pada kota dengan profil masyarakatnya yang modern cenderung membangun kerjasama dengan kota lain melalui pendekatan *bottom-up* lantas bagaimanakah pengembangan skema *sister city* yang melibatkan masyarakat dengan profil demografis yang sebaliknya. Artikel ini akan memberikan telaah terkait permasalahan tersebut berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan konsep pengembangan *sister city* yang sesuai dengan profil demografis masyarakat Banyuwangi.

## **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Nawawi (1990), di dalam konteks paradigma kualitatif tidak bermaksud untuk menguji suatu hipotesis tertentu akan tetapi bertujuan untuk menggambarkan suatu realitas yang mendiskripsikan subyek atau obyek penelitian secara komprehensif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kabupaten ini dikenal sebagai daerah yang secara konsisten menjaga dan melestarikan budaya.

Subyek penelitian dipilih berdasarkan teknik *snowball*. Dalam *snowball*, pertama-tama menentukan informan kunci (*key informan*) dan dari *key informan* kemudian baru ditentukan informan berikutnya berdasarkan petunjuk dari *key informan*. *Key informan* dalam penelitian ini yaitu 2 orang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kemiren, dan 2 orang pelaku pariwisata. Dari *key informan* kemudian baru ditentukan informan berikutnya berdasarkan petunjuk dari *key informan* yaitu pihak-pihak lain yang dianggap memahami dan mengetahui permasalahan ini seperti tokoh adat, tokoh masyarakat maupun warga masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, diskusi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Miles dan Huberman seperti dikutip Idrus (2009), mengemukakan model interaktif meliputi tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji validitas terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi.

## **4. Pembahasan**

### **4.1 Konsep Pembentukan *Sister City* melalui Strategi *Bottom-up***

Secara konseptual rancangan tentang pembentukan *sister city* guna meningkatkan industri pariwisata di Banyuwangi termasuk dalam kategori tindakan untuk menentukan masa depan atau lazim disebut perencanaan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Mengingat bahwa keberhasilan sebuah kebijakan akan sangat bergantung pada sejauh mana ketepatan rencananya, maka tahap ini menjadi penting untuk dibuat karena akan berfungsi sebagai pemberi arah serta meminimalkan ketidakpastian maupun inefisiensi sumber daya dalam pencapaian tujuan.

Dari dua pendekatan utama dalam studi tentang perencanaan pembangunan yakni *top-down* dan *bottom-up*, model yang disebut terakhir merupakan pendekatan yang boleh dikatakan paling sering dipilih dalam membangun kerjasama dalam

bentuk *sister city*. Seiring dengan menguatnya paradigma *new public service* dalam ilmu administrasi publik, pendekatan yang memberikan kesempatan luas kepada masyarakat dalam proses kebijakan publik juga semakin banyak dipraktekkan. Secara empiris, kerjasama yang dikemas dalam bentuk *sister city*, terutama yang berbasis pada keperluan akan pengembangan ekonomi bersama cenderung menggunakan strategi ini.

Rintisan kerjasama dua kota berbasis ekonomi melalui strategi *bottom-up* memang sangat masuk akal mengingat profil penduduk kota yang sudah maju dibidang ekonomi dan perdagangannya hampir dapat dipastikan terdiri dari masyarakat yang berpendidikan relatif baik, terbuka, dan memiliki wawasan luas. Masyarakat dalam tingkat kehidupan sosial ekonomi seperti ini secara terbuka dan aktif cenderung berani menyatakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan keinginan-keinginan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, ketika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyediakan informasi tentang kemajuan yang terjadi di kota lain maka salah satu respons mereka adalah berusaha mengetahui lebih jelas dengan cara mengunjungi kota tersebut sekaligus menjalin komunikasi dengan masyarakat setempat. Dengan kata lain, kebutuhan sebagai masyarakat yang sudah modern dan adanya keterbukaan akses informasi membuat jalinan hubungan antar masyarakat di kedua kota bukan saja sekedar terjadi akan tetapi bahkan berlangsung secara lebih intens.

Intensitas hubungan ini kemudian menjadi cikal bakal terjalinya hubungan bisnis yang bersifat saling menguntungkan, dan ketika hubungan tersebut menghadapi hambatan-hambatan seperti ketatnya regulasi perijinan ataupun kompetisi dengan pengusaha kota lain maka campur tangan pemerintah menjadi sangat diperlukan. Masyarakat di daerah-daerah yang sudah memiliki tingkat kesejahteraan, pendidikan, dan rasionalitas yang relatif cukup tinggi dan merata rata-rata sudah menyadari betul akan apa yang menjadi haknya demikian juga apa yang menjadi kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam dinamika hubungan antara masyarakat dan pemerintah, urusan publik tidak lagi hanya didominasi dan ditentukan secara sepihak oleh birokrat melalui jajaran aparaturnya.

Kedewasaan, keterbukaan, kesadaran akan hak dan kewajiban, dan kemandirian masyarakat menjadi kata kunci yang penting dalam terbangunnya kerjasama *sister city* melalui strategi atau pendekatan *bottom-up*. Himpunan karakteristik masyarakat semacam ini tidak ditemui ketika penelitian ini dilaksanakan di desa wisata Kemiren Kabupaten Banyuwangi. Secara implisit ketiadaan cara pandang sebagaimana tergambar ada pada masyarakat ‘modern’ juga terdeteksi melalui diskusi dengan masyarakat melalui forum diskusi kelompok. Beberapa tokoh adat bahkan dengan tegas mengatakan bahwa mereka akan mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah kabupaten. Mereka berpendapat bahwa adalah tugas pemerintah, bukan masyarakat, untuk merintis adanya kerjasama dengan daerah lain. Temuan ini membawa peneliti pada satu temuan yang dapat dirumuskan dalam proposisi minor yaitu jika rencana pembentukan kerjasama *sister city* melibatkan suatu daerah/kota yang memiliki karakteristik masyarakat agraris dan sangat teguh memegang budaya hormat pada pemimpin, maka inisiatifnya tidak bisa diharapkan murni tumbuh dan berkembang dari pihak masyarakat.

#### **4.2 Konsep Pembentukan *Sister City* melalui Strategi *Top-down***

Tidak dapat dipungkiri bahwa perencanaan pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat sementara pemerintah semata-mata hanya berperan sebagai fasilitator merupakan sebuah gagasan yang menarik dan ideal di era demokrasi saat ini. Namun demikian, konsep partisipatif dalam proses pembangunan yang dalam penelitian ini difokuskan pada perencanaan kebijakan publik tentang pembentukan kerjasama *sister city* di Banyuwangi nampaknya tidak tepat untuk dijadikan pilihan. Sebaliknya, strategi perencanaan yang berada di kutub berlawanan yakni pendekatan *top-down* justru dipandang lebih tepat untuk digunakan.

Pendekatan *top-down* adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja. Pada jenis-jenis kebijakan publik yang bersifat high-politics (termasuk didalamnya adalah kebijakan yang akibatnya terkait dengan masalah kelangsungan keamanan atau kedaulatan negara) tidak seorangpun akan menyangkal bahwa metode top-down merupakan pilihan pendekatan yang tepat. Contohnya adalah ketika pendekatan

model ini diterapkan semasa era Orde Baru halmana pemerintah berhasil mencapai pembangunan ekonomi yang menakjubkan dan keamanan nasional juga relatif lebih terjamin.

Lantas bagaimanakah model pendekatan ini ketika digunakan untuk merancang kerjasama *sister city* demi tercapainya kesejahteraan masyarakat? Penelitian yang kami laksanakan menemukan bahwa sekalipun terkesan sangat kental dengan nuansa Orde Baru, akan tetapi pendekatan *top-down* justru diharapkan oleh masyarakat Banyuwangi jika memang nantinya kerjasama dengan kota kembarnya akan diwujudkan. Secara prosedural, pembentukan, pengelolaan, upaya mempertahankan dan membangun kesuksesan kemitraan, serta mengembangkan kemampuan beraliansi menurut pendapat Villier (2009) terdiri dari 6 (enam) langkah. Dari ke enam tahap tersebut, langkah pertama yakni aspek strategi, merupakan tahap fundamental yang harus benar-benar disiapkan sebelum menuju terjalannya kerjasama kedua kota/daerah. Dinyatakan oleh Villier (2009) bahwa sebelum mitra terlibat, sebuah organisasi memerlukan strategi aliansi untuk menguraikan pemikiran terkait visi dan tujuan untuk kemitraan, strategi untuk pemilihan mitra, untuk mengelola, dan cara menangkap pembelajaran. Sementara Kern (2001:12) berkeyakinan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat lokal perlu strategi, dimana dua strategi yang ditempuh adalah *learning* dan *networking* internasional. Ketika tahap ini dilaksanakan dengan cermat dan sungguh-sungguh, maka akan menjadi jelas pula jenis mitra yang seperti apa yang harus dicari.

Berdasarkan analisis data penelitian yang telah dilakukan, pada tahap ini (aspek strategi) ada pandangan masyarakat yang kurang tepat terkait dengan kriteria kota mana yang sesuai untuk dijadikan “saudara/kembarnya”. Penilaian peneliti atas kekurangtepatan pilihan tersebut terkait pada pendapat yang disampaikan dalam forum diskusi oleh tokoh adat desa Kemiren yang menyatakan bahwa mereka merasa cocok dengan daerah Bangli di Bali sebagai mitra karena adat yang sangat mirip dengan yang ada di desanya. Harus dipahami bahwa kerjasama pelaksanaan program-program setelah *sister city* berhasil dibentuk bukanlah dilandaskan pada kecenderungan sifat dua saudara kembar yang secara mayoritas biasanya mirip satu sama lain. Akan tetapi landasan yang dijadikan alas adalah bahwa diantara kedua kota tersebut saling membutuhkan, melengkapi, dan memiliki semangat yang sama

dalam memajukan sektor-sektor yang ditetapkan dalam skema kerjasama. Kesimpulan ini didapatkan dari diskusi dengan pihak disbudpar Kabupaten Banyuwangi dan *stakeholders* yang bersepakat bahwa apabila ada dua daerah memiliki kemiripan potensi daerah yang dijadikan sebagai ikon wisata secara bersama-sama, yang muncul kemudian adalah justru persaingan dan saling menjatuhkan untuk merebut perhatian wisatawan. Temuan ini menjadi dasar peneliti untuk merumuskan proposisi yaitu jika dua kota/daerah memiliki potensi daerah yang mirip atau sama maka tercapainya tujuan dari bentuk kerjasama yang dibangun akan sulit lebih sulit tercapai karena kecenderungan yang terjadi diantara keduanya adalah kompetisi dan bukan kerjasama dalam artian yang seharusnya.

Implikasi teoritisnya adalah perlu adanya penyesuaian terhadap kriteria keberhasilan *sister city*, terutama dalam hal ini adalah sub-indikator input pada konteks kriteria kinerja. Sebagaimana sudah dikenal luas, para akademisi menyatakan bahwa keberhasilan *sister city* didasarkan pada kriteria kinerja dan kriteria efektivitas. Kriteria kinerja pada dasarnya bisa ditemukan dari indikator input, proses, dan output kerjasama *sister city*. Sedangkan kriteria efektivitas, adalah hasil yang diinginkan untuk dicapai dari kerjasama *sister city* (Dunn, 1998). Selama ini sub-indikator input yang terdiri dari empat sub-indikator, yakni (1) kepemimpinan kuat; (2) karakteristik wilayah yang sama; (3) sumber daya tersedia; dan (4) kebijakan nasional dan provinsi mendukung, diyakini sebagai kontributor keberhasilan *sister city*. Berdasar penelitian ini ditemukan bahwa karakteristik wilayah yang sama, yakni pada poin kedua, justru melemahkan kekuatan bangunan kerjasama *sister city* yang telah disepakati bersama.

## **5. Kesimpulan**

Peningkatan industri pariwisata di Banyuwangi dapat dilakukan melalui kerjasama antar pemerintah daerah dalam bentuk kota kembar (*sister city*). Pembentukan kerjasama *sister city* yang dilakukan suatu pemerintah daerah yang memiliki karakteristik masyarakat agraris dan sangat teguh memegang budaya hormat pada pemimpin, maka inisiatifnya tidak bisa diharapkan murni tumbuh dan berkembang dari pihak masyarakat. Keputusan untuk membangun kerjasama dengan daerah lain merupakan tugas dan kewenangan pemerintah daerah, sementara

masyarakat hanya bertugas melaksanakan apa yang sudah diputuskan pemerintah. Dengan kata lain model pendekatan *top-down* yang akan digunakan dalam membangun kerjasama *sister city*.

Adapun landasan kerjasama *sister city* didasarkan bahwa kedua kota tersebut saling membutuhkan, melengkapi, dan memiliki semangat yang sama dalam memajukan sektor-sektor yang ditetapkan dalam skema kerjasama. Namun karakteristik wilayah yang sama antara dua daerah, justru dapat melemahkan kekuatan bangunan kerjasama *sister city* yang telah disepakati bersama. Sebab apabila dua daerah memiliki kemiripan atau kesamaan potensi daerah yang dijadikan sebagai ikon wisata secara bersama-sama, maka tujuan dari bentuk kerjasama yang dibangun akan lebih sulit tercapai karena kecenderungan yang terjadi diantara keduanya adalah kompetisi dan bukan kerjasama dalam artian yang seharusnya.

### **Saran/Rekomendasi**

Diperlukan sinergitas antara pemerintah daerah, tokoh adat, masyarakat dan *stakeholders* lainnya dalam rangka pemberdayaan budaya Using sebagai upaya mendorong perkembangan industri pariwisata. Selain itu pemerintah daerah harus mampu mengambil inisiatif guna membangun kerjasama *sister city* baik dalam skala domestik maupun internasional.

### **Referensi**

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 2016. *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021*.
- Dunn, W.N. 1998. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall International Inc., Englewood Cliffs.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nawawi, H. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

O'Toole, Kern. (2001). Kokusaika and Internationalisation: Australian and Japanese Sister City Type Relationships. *Australian Journal of International Affairs*, 55(3).

Villiers, J. C. (2009). Success Factors and the City-to-city Partnership Management Process – From Strategy to Alliance Capability. *Habitat International*. 33(2).